

## **BAB IV HASIL MAGANG INDUSTRI DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

#### **1. Sejarah Singkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

DPRD Kota Bandung adalah Lembaga perwakilan lokal tingkat kota yang ada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. DPRD Kota Bandung memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sekretaris DPRD Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, dan admisnitiasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tuga dan wewenangnya, DPRD Kota berhak meminta pejabat negara tingkat kota, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

#### **2. Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung**

##### **VISI**

Terwujudnya pelayanan yang prima pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menuju Kota unggul, nyaman dan sejahtera.

## **MISI**

Meningkatkan kualitas dan efektifitas fasilitas tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung.

### **3. Tujuan dan Maksud Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung**

Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan Pemerintah daerah juga dimaksudkan agar hubungan DPRD dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

#### **1. Logo Instansi**

Lambang kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota besar Bandung tahun 1953, tertanggal 8 Juni 1953, yang diijinkan dengan Keputusan Presiden tertanggal 28 april 1953 No. 104 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 Agustus 1954 No. 4 lampiran No. 6 Lambang tersebut bertokoh PERISAI yang berbentuk JANTUNG yang diberi padi dan juga kapas.

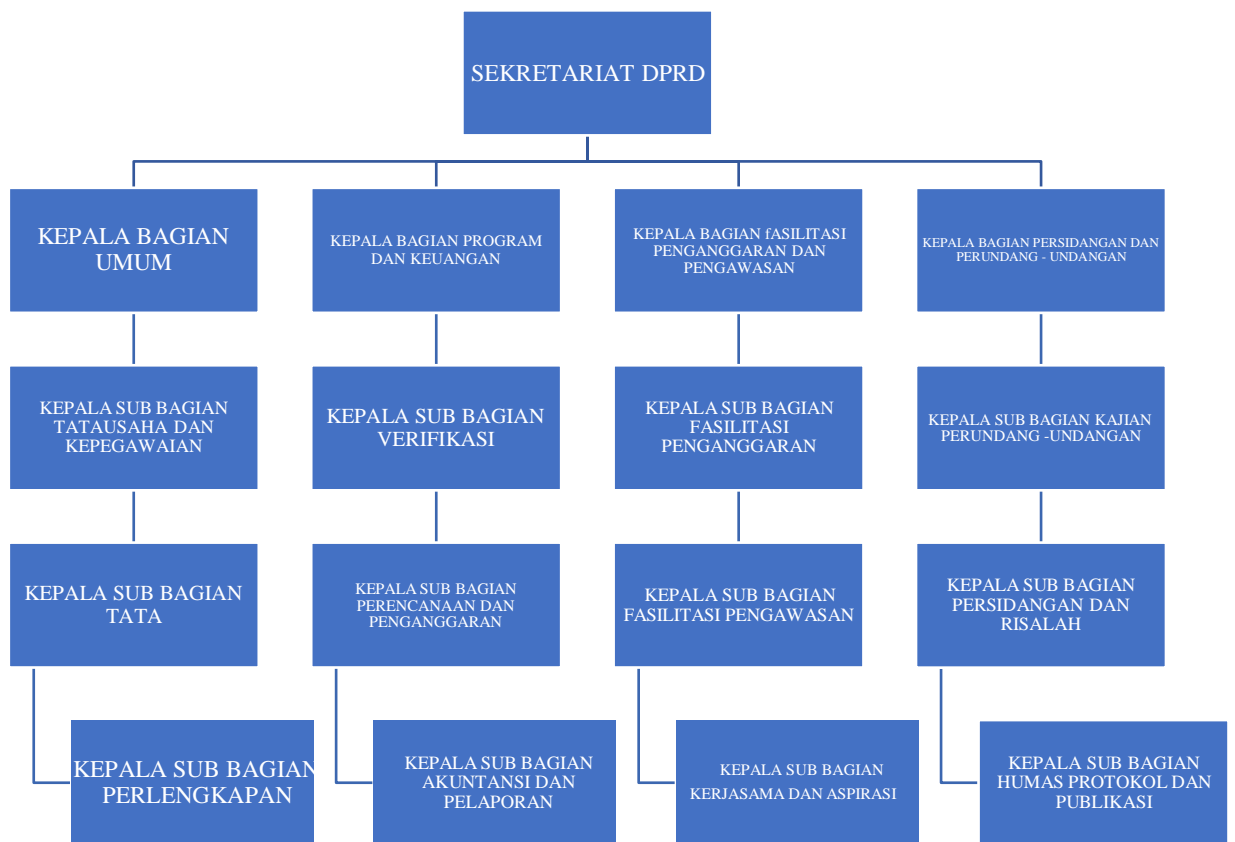
**Gambar 4. 1**  
**Logo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**



*Sumber: Logo DPRD Kota Bandung*

## 2. Struktur Organisasi

**Gambar 4. 2**  
**Struktur Dewan Perwakilan rakyat daerah**



*Sumber : Sekretariat DPRD Kota Bandung*

### **3. Uraian Pekerjaan (*Job Description*)**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung terdiri dari 4 unit kerja, yaitu :

a. Bagian Umum.

Menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.

(a) Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja pada Sekretariat DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(b) Sub Bagian Rumah Tangga

Mengumpulkan dan menganalisa data lingkup rumah tangga.

(c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Melaksanakan fasilitas penyusunan pedoman dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Hubungan Masyarakat dan Protokol

b. Bagian Program dan Keuangan.

Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

(a) Sub Bagian Anggaran.

melaksanakan pengelolaan data anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.

(b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.

melaksanakan administrasi pembayaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD.

c. Bagian Hukum dan Perundang – undangan.

Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan persidangan dan rapat – rapat di DPRD.

(a) Sub Bagian Perundang – undangan

Mengumpulkan dan Menganalisa Perundang – undangan DPRD.

(b) Sub Bagian Persidangan

Melaksanakan persiapan materi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, berita acara, pelantikan/pengambilan sumpah jabatan pimpinan dan anggota DPRD.

d. Bagian Pengawasan.

Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di kantor DPRD.

## **B. Hasil Magang Industri**

### **1. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pada DPRD Kota Bandung**

Prosedur Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai PPKD/BUD. Laporan keuangan Pemda ini dibuat setiap semester/tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut.

Untuk bisa menyusun laporan keuangan Pemda, terlebih dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD/BUD. Pada saat akan disusun laporan keuangan pemda maka laporan keuangan SKPD dan PPKD digabungkan untuk menjadi laporan keuangan tingkat Pemda. Format laporan keuangan PPKD sama dengan laporan keuangan SKPD. Yang berbeda dari kedua laporan keuangan tersebut adalah cakupan transaksi dan akun yang digunakannya.

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar tiap-tiap akun.

Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan PPKD sesuai dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas: Neraca saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca

Saldo setelah Penyesuaian, Jurnal Penutupan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebelum konversi dan Laporan Realisasi Anggaran setelah konversi, kemudian menyusun Neraca sebelum konversi dan Neraca setelah konversi.

### **1. Neraca Saldo**

Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom Neraca Saldo dalam *worksheet*, sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing.

### **2. Jurnal Penyesuaian**

Jurnal penyesuaian dimaksudkan agar nilai dari akun-akun LRA dan neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi: transaksi penyesuaian akibat adanya perbedaan waktu pengakuan transaksi seperti pengakuan piutang, akumulasi penyusutan di akhir periode akuntansi, penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan untuk pembelian/pembangunan aktiva tetap, dan penyesuaian penerimaan hibah berupa aset. Jurnal Penyesuaian terdiri dari:



a. Jurnal Penyesuaian untuk Pengakuan Piutang

**Tabel 4. 1**

Dr	Piutang Pendapatan	xxx	
Cr	Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang		xxx

b. Jurnal Penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan untuk pembelian/pembangunan aktiva tetap

**Tabel 4. 2**

Dr	EDL – Dana yang disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	Xxx	
Cr	Utang Jangka Pendek		xxx

c. Jurnal Penyesuaian untuk penerimaan Hibah Aset.

**Tabel 4. 3**

Dr	Aset	xxx	
Cr	Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset		xxx

### **3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran PPKD Sebelum Konversi**

Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat, disusun setiap semester/tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

### **4. Jurnal Penutup**

Jurnal Penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal sehingga menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta menutup surplus/defisit ke ekuitasnya PPKD.

### **5. Neraca PPKD Sebelum Konversi**

Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca PPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

### **6. Konversi Laporan Keuangan PPKD**

Laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD yang dihasilkan oleh sistem ini menggunakan struktur akun belanja yang berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## **7. Penyusunan Laporan Keuangan Setelah Konversi**

- a. Laporan Realisasi Anggaran PPKD Setelah Konversi
- b. Neraca PPKD Setelah Konversi

## **8. Penyusunan Laporan Arus Kas**

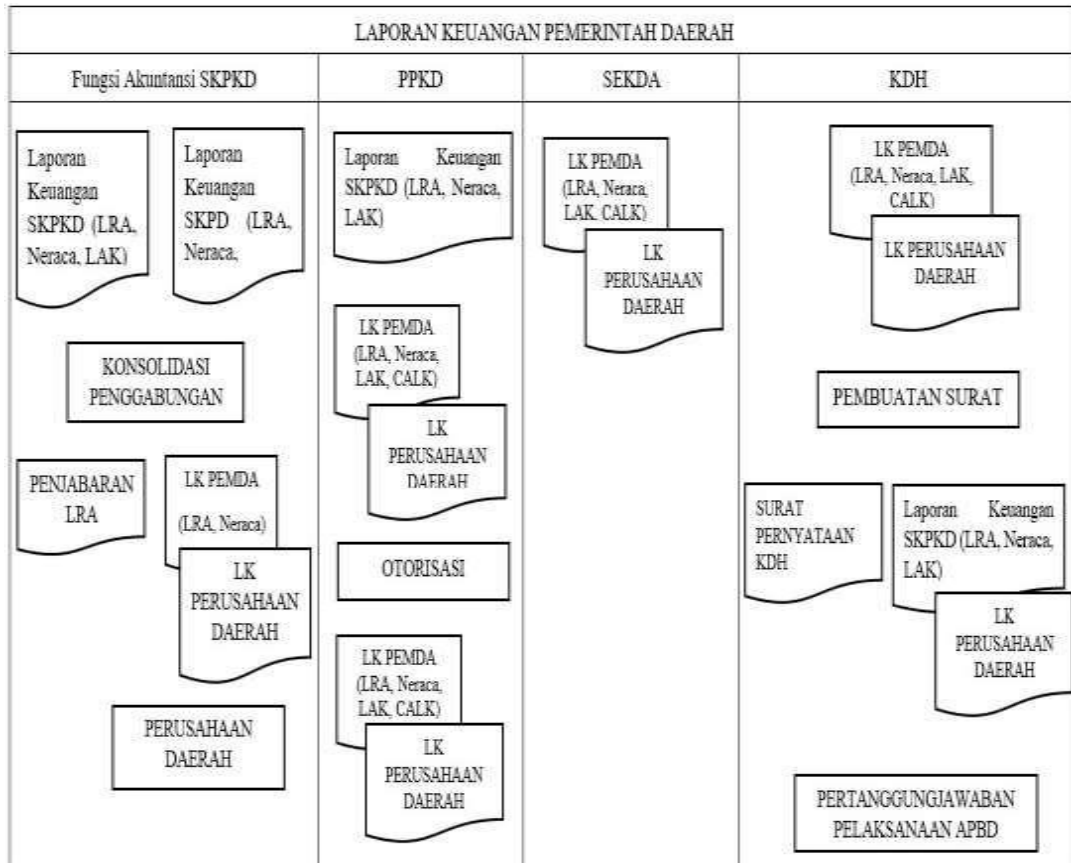
Laporan Arus Kas disusun untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

## **9. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Gambar 4.3**

**Bagan Alir (Flowchart) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**



Sumber: LKPD DPRD Kota Bandung

Adapun Komponen Laporan Keuangan DPRD Kota Bandung terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antar anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur – unsur Pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Daerah Kota Bandung sebesar **Rp5.643.962.288.458,92**. Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kota Bandung sebesar **Rp5.407.125.732.054,00** atau mencapai **84,71** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp.6.382.749.756.908,28**.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar **Rp.43.801.722.081.590,20**. Yang terdiri dari: Aset lancar sebesar **Rp.955.218.995.350,23**; Aset tetap (neto) sebesar

**Rp.40.165.990.122.683,20;** dan Aset lainnya (neto) sebesar **Rp.299.749.262.237,96.** Nilai kewajiban dan ekuitas sebesar **Rp.43.801.722.081.590,20.**

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020 untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 menunjukkan pendapatan sebesar **Rp5.819.153.164.511,71** dan beban sebesar **Rp5.566.117.025.580,57** sehingga diperoleh Surplus dari Operasi sebesar **Rp253.036.138.931,14.** Selama tahun 2020 terdapat neto surplus dari kegiatan non operasi sebesar **Rp188.768.953.942,20** yang diperoleh dari surplus kegiatan non operasi sebesar **Rp193.573.154.797,20** dan defisit kegiatan non operasi sebesar **Rp4.804.200.855,00.** Sedangkan jumlah pos luar biasa selama tahun 2020 adalah nihil sehingga dengan demikian Surplus – LO setelah diperhitungkan surplus dari operasi, defisit dari kegiatan non operasi dan pos luar biasa adalah sebesar **Rp441.805.092.873,34.**

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Laporan Arus Kas pada awal tanggal 01 Januari 2020 adalah **Rp.231.278.924.143,03,** ditambah Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi **Rp.794.938.109.822,92,** kemudian adanya Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi **Rp(547.778.792.618,00).**

Ditambah adanya Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan **Rp.0,00**, dan juga Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris **Rp.0,00**. Menjadikan Saldo Akhir per 31 Desember 2020 **Rp.478.438.241.347,95**.

e. Laporan Perubahan ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar **Rp.43.317.183.782.730,90**, ditambah defisit-LO sebesar **Rp.441.805.092.873,34**, kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar **Rp.0,00**, dan Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar **Rp.(125.762.673.292,23)**, kenaikan ekuitas **Rp.316.042.419.581,1**. Sehingga ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai **Rp. 43.633.226.202.312,00**.

f. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, Laporan Arus kas, dan juga Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

**Tabel 4. 4**  
**Laporan Realisasi Anggaran**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

URAIAN	TA 2020		%	TA 2019
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Yang Sah	-	-		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.151.470.832.765,25</b>	<b>5.643.962.288.458,92</b>	<b>91,75%</b>	<b>6.381.818.944.636,00</b>
<b>BELANJA</b>				
Belanja Operasi	5.407.177.302.818,57	4.650.334.229.661,00	86,00%	5.131.020.269.061,67
Belanja Modal	667.422.048.855,71	558.480.387.618,00	83,68%	1.179.429.469.424,00
Belanja Tak Terduga	272.400.450.234,00	165.205.114.775,00	60,65%	197.529.875,00
<b>TRANSFER</b>				
transfer bagi hasil ke desa	0	0	0,00%	0
Transfer/Bantuan Keuangan	35.750.000.000,00	33.106.000.000,00	92,60%	1.499.999.999,00
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>6.382.749.756.908,28</b>	<b>5.407.125.732.045,00</b>	<b>84,71%</b>	<b>6.312.147.268.359,67</b>

*Sumber: LKPD Kota Bandung Bagian Keuangan*



**Tabel 4.5****Neraca****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH****NERACA****PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

<b>URAIAN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di kas Daerah	367.432.364.070,00	139.740.578.142,00
Kas di bendahara Penerimaan	6760000,00	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	179.068.520,00	218.830.550,00
Setara Kas	21.984.600,00	10.322.760.800,00
Investasi Jangka Pendek	0	0
Piutang Pajak	1.171.691.600.513,83	1.075.664.922.541,35
Penyisihan Piutang Pajak	-895.007.238.753,43	-827.205.899.297,21
Piutang Pajak Neto	276.684.361.760,40	248.459.023.344,14
Piutang Retribusi	7.915.623.524,00	7.519.868.524,00
Penyisihan Piutang Retribusi	-4.284.954.826,80	-4.736.254.722,80
Piutang Retribusi Neto	3.630.668.687,20	2.783.613.801,20
Piutang Pendapatan Lainnya	107.260.814.123,28	95.119.985.926,76
Penyisihan Pendapatan Lainnya	-14.876.117.640,56	-13.553.146.760,73
Piutang Pendapatan lainnya Neto	92.384.696.482,72	81.566.839.166,03
Belanja Dibayar Dimuka	4.167.537.145,98	4.020.946.526,99
Piutang Lainnya	0	0
Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
Piutang Lainnya Neto	0	0
Persediaan	99.891.505.315,98	74.609.516.687,59
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>955.218.995.350,23</b>	<b>663.041.624.468,98</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	33.447.009.328.243,00	33.643.959.071.743,00
Peralatan dan Mesin	2.991.808.830.237,58	2.635.210.434.547,45
Gedung dan Bangunan	3.966.620.548.028,81	3.777.483.902.493,09
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.642.609.668.127,03	3.505.114.849.060,91
Aset Tetap Lainnya	242.268.380.641,05	231.368.835.810,05
Kontribusi dalam Pengerjaan	214.268.533.490,40	238.123.365.503,40
Akumulasi Penyusutan	-4.338.595.166.084,70	-3.684.020.415.409,17

<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>40.165.990.122.683,20</b>	<b>40.347.240.043.748,70</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran	384.844.428,00	384.844.428,00
Tuntutan Ganti Rugi	127.920.000,00	127.920.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Aset Tak Berwujud	28.113.345.060,00	27.103.678.660,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-26.879.084.940,00	-25.431.232.460,00
Aset Tak Berwujud Neto	1.234.260.120,00	1.672.446.200,00
Aset Lain-lain	298.002.237.589,96	331.229.507.413,66
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>299.749.262.137,96</b>	<b>333.414.718.041,66</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>43.801.722.081.590,10</b>	<b>43.525.674.870.159,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Pehitungan Pihak Ketiga	0	0
Utang Bunga	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	48.681.082.560,25	43.312.343.870,67
Utang Beban	104.768.918.530,50	144.572.412.302,00
Utang jangka Pendek Lainnya	15.047.878.187,40	20.606.331.255,40
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>168.495.879.278,15</b>	<b>208.491.087.428,07</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Luar Negeri	0	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	43.633.226.202.312,00	43.317.183.782.730,90
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>43.801.722.081.590,20</b>	<b>43.525.674.870.159,00</b>

Sumber: LKPD Kota Bandung Bagian Keuangan

**Tabel 4. 6**  
**Laporan Operasional**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

URAIAN	2020
<b>PENDAPATAN-LO</b>	
Pendapatan Asli Daerah	2.141.660.528.347,87
Pendapatan Transfer	3.270.078.488.822,50
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	407.414.147.341,34
<b>JUMLAH</b>	<b>5.189.153.164.511,71</b>
<b>BEBAN</b>	
Beban Operasi	5.533.011.025.580,57
Beban Transfer	33.106.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>5.566.117.025.580,57</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) NON OPERASIONAL</b>	
SURPLUS	193.573.154.797,20
Defisit	4.804.200.855,00
<b>JUMLAH</b>	<b>188.768.953.942</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	
Pendapatan Luar Biasa	0
Beban Luar Biasa	0
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>

*Sumber: LKPD Kota Bandung Bagian Keuangan*

**Tabel 4. 7**  
**Laporan Arus Kas**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI</b>
Saldo Kas Awal per 1 Januari 2020	231.278.924.143,03
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	794.938.109.822,92
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	547.778.792.618,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00
Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2020	478.438.241.347,95

*Sumber: LKPD Kota Bandung Bagian Keuangan*

**Tabel 4.8**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

URAIAN	REALISASI
Ekuitas Awal	43.317.183.782.730,90
Surplus/(DEFISIT) LO	441.805.092.873,34
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kesalahan Mendasar</b>	
1. Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
2. Lain-lain (Koreksi Ekuitas Lainnya)	125.762.673.292,23
Ekuitas Akhir	43.633.226.202.312,00

*Sumber: LKPD Kota Bandung Bagian Keuangan*

APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Salah satu ketentuan yang mendasari perubahan adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 9**  
**Jenis Transfer**

<b>URAIAN</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>TAMBAH/(KURANG)</b>
Pendapatan	7.117.204.956.964,00	6.039.502.129.310,25	-1.077.702.827.653,75
Belanja	7.698.341.521.707,08	6.270.781.053.453,28	-1.427.560.468.253,80
Surplus/(Defisit)	-581.136.564.743,08	-231.278.924.143,03	349.857.640.600,05
Pembiayaan:			
- Penerimaan	581.136.564.743,08	231.278.924.143,03	-349.857.640.600,05
- Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
- Pembiayaan			
Neto	581.136.564.743,08	231.278.924.143,03	-349.857.640.600,05
SiLPA/(SiKPA)	0,00	0,00	0,00

*Sumber: LKPD Kota Bandung Bagian Keuangan*

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 **Rp.5.643.962.288.458,92** atau sebesar 91,75 persen dari anggaran sebesar **Rp.6.151.470.832.765,25** terdiri dari:

**Tabel 4. 10**  
**Realisasi Pendapatan**

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%
Pendapatan Asli Daerah	2.264.814.094.039,25	2.063.783.773.735,92	91,12
Pendapatan Transfer	3.658.411.674.652,00	3.352.264.380.653,00	91,63
Lain-lain Pendapatan yang Sah	228.245.064.074,00	227.914.134.070,00	99,86
<b>JUMLAH</b>	<b>6.151.470.832.765,25</b>	<b>5.643.962.288.458,92</b>	<b>91,75</b>

*Sumber: LKPD Kota Bandung Bagian Keuangan*

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 menunjukkan pendapatan daerah sebesar **Rp5.643.962.288.458,92** atau 91,75 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp6.151.470.832.765,25**. Sedangkan realisasi belanja dan transfer adalah sebesar **Rp5.407.125.732.054,00** atau 84,71 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp6.382.749.756.908,28**. Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan transfer diperoleh surplus sebelum Pembiayaan Netto sebesar **Rp236.836.556.404,92**. Surplus tersebut selanjutnya ditambah dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp241.601.684.943,03 sehingga SiLPA menjadi sebesar Rp478.438.241.347,95.

Pemerintah melakukan perubahan perhitungan target keuangan. Hal ini diwujudkan dengan dilakukannya *refocusing* dan realokasi anggaran. Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sebesar **Rp5.643.962.288.458,92** dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun 2019 sebesar **Rp6.381.818.944.636,00** mengalami penurunan sebesar **Rp737.856.656.177,08** atau 11,56 persen.

Pendapatan daerah yang terdampak besar oleh pandemi Covid-19 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana realisasi PAD tahun 2020 sebesar **Rp2.063.783.773.735,92** lebih rendah dibanding tahun 2019 sebesar **Rp2.548.258.990.275,00** atau turun sebesar **Rp484.475.216.539,08**. Penurunan PAD tersebut mencapai **65,66** persen dari total penurunan pendapatan daerah dan yang terbesar ada di penurunan pendapatan pajak daerah. Penurunan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 11**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan**

<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI 2020</b>	<b>REALISASI 2019</b>	<b>KENAIKAN/PENRUNAN</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.063.783.773.735,92	2.548.258.990.275,00	-484.475.216.539,08
Pendapatan Transfer	3.352.264.380.653,00	3.626.141.954.361,00	-273.877.573.708,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	227.914.134.070,00	207.418.000.000,00	20.496.134.070,00
<b>JUMLAH</b>	<b>5.643.962.288.458,92</b>	<b>6.381.818.944.636,00</b>	<b>-737.856.656.177,08</b>

*Sumber: LKPD Kota Bandung Bagian Keuangan*



Realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp5.407.125.732.054,00** atau mencapai **84,71** persen dari anggaran belanja dan transfer sebesar **Rp6.382.749.756.908,28** yang terdiri dari:

**Tabel 4. 12**  
**Realisasi Belanja dan Transfer 2020**

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%
Belanja Operasi	5.407.177.302.818,57	4.650.334.229.661,00	86,00
Belanja Modal	667.422.048.855,71	558.480.387.617,00	83,68
Belanja Tak Terduga	272.400.405.234,00	165.205.114.775,00	60,65
Transfer/Bantuan Keuangan	38.750.000.000,00	33.106.000.000,00	92,60
<b>JUMLAH</b>	<b>6.382.749.756.908,28</b>	<b>5.407.125.732.054,00</b>	<b>84,71</b>

*Sumber: LKPD Kota Bandung Bagian Keuangan*

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 lebih rendah **84,67** persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan akibat dari adanya pandemic Covid-19 secara otomatis berdampak kepada target maupun Realisasi belanja daerah.

**Tabel 4. 13**  
**Perbandingan Realisasi Belanja**

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Operasi	4.650.334.229.661,00	5.131.020.269.061,67	86,00
Belanja Modal	558.480.387.618,00	1.179.429.469.424,00	83,68
Belanja Tak Terduga	165.205.114.775,00	197.529.875,00	60,65
<b>JUMLAH</b>	<b>5.374.019.732.054,00</b>	<b>6.310.647.268.360,67</b>	<b>84,67</b>

*Sumber: LKPD Kota Bandung Bagian Keuangan*

**Tabel 4. 14**  
**Realisasi Belanja Operasi**

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI 2019	NAIK/(TURUN) %
Belanja Pegawai	2.169.321.718.452,00	2.535.338.719.039,00	87,50
Belanja Barang	2.084.516.874.513,00	2.294.327.100.117,67	82,67
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	139.153.204.134,00	108.825.685.200,00	99,29
Belanja Hibah	177.728.392.762,00	190.285.964.705,00	95,22
Belanja Bantuan Sosial	79.614.039.800,00	2.242.800.000,00	99,98
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>4.650.334.229.661,00</b>	<b>5.131.020.269.061,67</b>	<b>86,00</b>

*Sumber: LKPD Kota Bandung Bagian Keuangan*

Realisasi Belanja Operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing – masing sebesar **Rp. 4.650.334.229.661,00**, dan **Rp. 5.131.020.269.061,67**. Realisasi Belanja Operasi untuk periode yang berakhir 31

Desember 2020 mengalami penurunan sebesar **86,00** persen dari Realisasi Belanja Operasi periode 31 Desember 2019.

**Tabel 4. 15**  
**Realisasi Belanja Modal**

URAIAN	REALISASI TA 2020	Realisasi TA 2019	NAIK/(TURUN) %
Belanja Tanah	20.865.064.000,00	54.784.174.000,00	95,62
Belanja Peralatan dan Mesin	353.811.845.854,00	597.169.086.478,00	86,66
Belanja Gedung dan Bangunan	51.119.717.927,00	264.128.358.116,00	64,76
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	126.734.813.432,00	226.320.905.438,00	82,37
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.948.946.405,00	37.026.945.392,00	131,68
<b>JUMLAH</b>	<b>558.480.387.618,00</b>	<b>1.179.429.469.424,00</b>	<b>83,68</b>

*Sumber: LKPD Kota Bandung Bagian Keuangan*

Realisasi Belanja Modal untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing – masing sebesar **Rp.558.480.387.618,00**, dan **Rp.1.179.429.469.424,00**. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar **83,68** persen dari Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2019.

Realisasi Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing – masing sebesar **Rp.165.205.114.775,00** dan **Rp.197.529.875,00** yang mengalami penurunan sebesar **60,65** persen. Penurunan ini disebabkan adanya pandemik Covid-19 di tahun 2019. Penyesuaian yang dilakukan dalam perubahan terhadap APBD Tahun 2020 dimaksudkan untuk percepatan penanganan *corona virus disease* 2019. Penyesuaian dimaksud salah satunya

berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## **2. Penyusunan Laporan Keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

### **Kota Bandung sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan Menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk penyusunan Laporan Keuangan pada DPRD Kota Bandung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomo 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah – kaidah Pengelolaan dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan Informasi Keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel

## **C. Pembahasan**

### **1. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2020 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang - undangan.

Namun menurut Tanjung (2014), secara umum ada macam – macam jenis laporan keuangan yang bisa disusun, yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,
- c. Laporan Operasional,
- d. Laporan Arus Kas,
- e. Laporan Perubahan Ekuitas

f. Catatan atas Laporan Keuangan

**Tabel 4. 16**  
**Komponen – komponen Laporan Keuangan**

No	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tanjung (2014)	Keterangan
1.	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran	Sesuai
2.	Neraca	Neraca	Sesuai
3.	Laporan Operasional	Laporan Operasional	Sesuai
4.	Laporan Arus Kas	Laporn Arus Kas	Sesuai
5.	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Perubahan Ekuitas	Sesuai
6.	Catatan atas Laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan	Sesuai

(Sumber: Data yang Diolah)

- a) Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antar anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur – unsur Pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Daerah Kota Bandung sebesar **Rp5.643.962.288.458,92**. Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kota Bandung sebesar **Rp5.407.125.732.054,00** atau mencapai **84,71** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp.6.382.749.756.908,28**.
- b) Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai aset per 31 Desember 2020 dicatat dan

disajikan sebesar **Rp.43.801.722.081.590,20**. Yang terdiri dari : Aset lancar sebesar **Rp.955.218.995.350,23**; Aset tetap (neto) sebesar **Rp.40.165.990.122.683,20**; dan Aset lainnya (neto) sebesar **Rp.299.749.262.237,96**. Nilai kewajiban dan ekuitas sebesar **Rp.43.801.722.081.590,20**.

- c) Laporan Operasional Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020 untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 menunjukkan pendapatan sebesar **Rp5.819.153.164.511,71** dan beban sebesar **Rp5.566.117.025.580,57** sehingga diperoleh Surplus dari Operasi sebesar **Rp253.036.138.931,14**. Selama tahun 2020 terdapat neto surplus dari kegiatan non operasi sebesar **Rp188.768.953.942,20** yang diperoleh dari surplus kegiatan non operasi sebesar **Rp193.573.154.797,20** dan defisit kegiatan non operasi sebesar **Rp4.804.200.855,00**. Sedangkan jumlah pos luar biasa selama tahun 2020 adalah nihil sehingga dengan demikian Surplus – LO setelah diperhitungkan surplus dari operasi, defisit dari kegiatan non operasi dan pos luar biasa adalah sebesar **Rp441.805.092.873,34**.
- d) Laporan Arus Kas bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Laporan Arus Kas pada awal tanggal 01 Januari 2020 adalah **Rp.231.278.924.143,03**, ditambah Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi **Rp.794.938.109.822,92**, kemudian adanya Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi **Rp(547.778.792.618,00)**.

Ditambah adanya Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan **Rp.0,00**, dan juga Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris **Rp.0,00**. Menjadikan Saldo Akhir per 31 Desember 2020 **Rp.478.438.241.347,95**.

- e) Laporan Perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar **Rp.43.317.183.782.730,90**, ditambah defisit-LO sebesar **Rp.441.805.092.873,34**, kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar **Rp.0,00**, dan Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar **Rp.(125.762.673.292,23)**, kenaikan ekuitas **Rp.316.042.419.581,1**. Sehingga ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai **Rp. 43.633.226.202.312,00**.
- f) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, Laporan Arus kas, dan juga Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.



## **2. Perbandingan Laporan Keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah**

Penyusunan Laporan Keuangan DPRD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintah dan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah. Laporan Keuangan ini telah disusun dengan basis akrual sehingga akan mampu menyiakn informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung adalah basisakrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di Laporan Operasional.

Basis akrual untuk neraca dan berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas

diterima atau dibayar oleh kas daerah Kota Bandung. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah Kota Bandung, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran.

**Tabel 4. 17**  
**SAP Basis Akrua**

No	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Standart Akuntansi Perintah (SAP)	Keterangan
1.	Pengakuan Pendapatan	Pengakuan Pendapatan	Sesuai
	Pendapatan - LRA	Pendapatan - LRA	Sesuai
	Pendapatan - LO	Pendapatan - LO	Sesuai
2.	Pengakuan Beban dan Belanja	Pengakuan Beban dan Belanja	Sesuai
3.	Pengakuan Pembiayaan	Pengakuan Pembiayaan	Sesuai

Sumber: (Data yang Diolah)

- a) Pengakuan Pendapatan yang disusun dalam Laporan keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Basis akrual, yaitu sebagai berikut:

(a) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan saat pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah namunsampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

(b) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

b) Pengakuan Beban dan Belanja yang disusun dalam Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Basis Akrua, yaitu sebagai berikut:

- (a) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (b) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- c) Pengakuan Pembiayaan yang disusun dalam Laporan Keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Basis Akruwal, yaitu sebagai berikut:
  - (a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah Kota Bandung. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah Kota Bandung. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan

pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.